RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 065/PUU-II/2004

I. PEMOHON

Abilio Jose Osorio Soares

KUASA HUKUM

O.C. Kaligis, S.H., MH., dkk

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia :

Pasal 43 ayat (1)

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad-hoc.”

III. DASAR DAN ALASAN

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD 1945 :

Pasal 28 I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

IV. ALASAN-ALASAN

1. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan secara jelas dan tegas bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dimana ketentuan ini adalah bersifat mutlak, tanpa kecuali dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun, termasuk alasan keadaan luar biasa atau *“extraordinary”*.
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 merupakan akseptasi dari berlakunya Asas Berlaku Surut atau Asas Retroaktif yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

3. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengukuhkan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan menempatkan asas *a quo* dalam tingkatan peraturan perundang-undangan yang tertinggi (*hogere optrekking*) pada tatanan hukum konstitusional.

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk pengujian Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara R.I.1945;
2. Menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) **dan ayat (2) Undang-Undang** Mc. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara R.I. 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 065/PUU-II/2004

Perbaikan Tgl, 11 November 2004

I. PEMOHON

Abilio Jose Osorio Soares

KUASA HUKUM

O.C. Kaligis, S.H., MH., dkk

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia :

- Pasal 43 ayat (1)

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad-hoc.”

III. DASAR DAN ALASAN

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD 1945 :

Pasal 28 I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

IV. ALASAN-ALASAN

1. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan secara jelas dan tegas bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dimana ketentuan ini adalah bersifat mutlak, tanpa kecuali dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun, termasuk alasan keadaan luar biasa atau “*extraordinary*”.
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 merupakan akseptasi dari berlakunya Asas Berlaku Surut atau Asas Retroaktif yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

3. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengukuhkan peraturan perundang-undangan sebelumnya dan menempatkan asas *a quo* dalam tingkatan peraturan perundang-undangan yang tertinggi (*hogere optrekking*) pada tatanan hukum konstitusional.

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk pengujian Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara R.I.1945;
2. Menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) **dan ayat (2) Undang-Undang** Mc. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara R.I. 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;